

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024, dengan fokus pada analisis kinerja derajat desentralisasi fiskal, analisis kinerja efektivitas PAD, analisis kinerja pertumbuhan PAD, dan analisis kinerja kontribusi komponen PAD. Berdasarkan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, dan observasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD tujuh pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah diaudit BPK, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

1. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024 menunjukkan kondisi yang secara umum masih tergolong lemah dan belum mencerminkan kemandirian fiskal yang optimal. Secara keseluruhan, tidak ada pemerintah kota yang berhasil mencapai kategori Sedang, Baik, atau Sangat Baik selama periode penelitian. Terdapat tiga pengelompokan kinerja yang berbeda, yaitu:
 - a. Kota Padang merupakan satu-satunya kota yang konsisten berada dalam kategori Cukup dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 26,54% per tahun. Capaian ini mencerminkan kapasitas fiskal yang relatif lebih kuat sebagai pusat ekonomi Provinsi Sumatera Barat, meskipun belum melampaui ambang batas kategori Cukup (30%). Puncak tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan rasio 28,51%, yang mendekati namun belum menembus batas tersebut.
 - b. Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Payakumbuh seluruhnya berada dalam kategori Kurang dengan rata-rata rasio masing-masing sebesar 16,75%, 16,75%, dan 16,59%. Ketiga kota ini memiliki potensi untuk meningkat ke kategori Cukup, namun

masih memerlukan upaya peningkatan PAD yang lebih sistematis dan konsisten, mengingat ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan daerah mereka.

- c. Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Pariaman mencatat kondisi paling buruk dengan rata-rata rasio masing-masing 9,88%, 8,22%, dan 6,37%, seluruhnya berada dalam kategori Sangat Kurang. Kota Pariaman mencatatkan rasio terendah dalam penelitian ini, dengan kondisi pada tahun 2022 yang bahkan hanya mencapai 5,94%, menggambarkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Kota Sawahlunto pada dua tahun pengamatan (2021 dan 2023) masuk dalam kategori Sangat Kurang, sementara Kota Solok secara konsisten berada di level terendah kedua selama seluruh periode penelitian.

Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi otonomi daerah di sebagian besar kota di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan fundamental dalam hal kemandirian fiskal, di mana kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri masih jauh dari yang diharapkan (Halim, 2014).

2. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024 memperlihatkan variasi yang signifikan, dengan sebagian besar kota berada pada kategori efektif meskipun dengan tren yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil analisis tingkat efektivitas PAD, terdapat empat pola kinerja yang teridentifikasi, yaitu:
 - a. Kota Payakumbuh mencatatkan kinerja efektivitas terbaik dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 106,42% yang dikategorikan Sangat Efektif. Kota ini secara konsisten berhasil melampaui target anggaran PAD yang ditetapkan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan tingkat efektivitas masing-masing sebesar 116,57%, 105,95%, dan 106,51%.

- b. Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto masing-masing mencatat rata-rata efektivitas 94,00% dan 96,26% dengan kategori Efektif. Namun keduanya menunjukkan tren penurunan efektivitas yang perlu diwaspadai. Kota Padang Panjang bahkan mencatat kategori Kurang Efektif pada tahun 2024 dengan rasio 77,72%, sementara Kota Sawahlunto mengalami penurunan ke Cukup Efektif pada tahun 2023.
- c. Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Pariaman mencatat rata-rata efektivitas yang masuk kategori Efektif, masing-masing sebesar 92,50%, 95,26%, dan 94,52%. Kota Bukittinggi menunjukkan tren penurunan efektivitas yang konsisten dari 99,65% pada tahun 2021 menjadi 84,79% pada tahun 2024, mengindikasikan peningkatan target anggaran yang tidak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan yang setara.
- d. Kota Padang menunjukkan pola yang unik dan positif dengan tren efektivitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun rata-ratanya sebesar 85,70% masuk dalam kategori Cukup Efektif. Peningkatan dari 66,68% pada tahun 2021 menjadi 93,73% pada tahun 2024 mencerminkan perbaikan manajemen penetapan target dan optimalisasi penggalan potensi PAD yang semakin baik dari waktu ke waktu (Mahmudi, 2016).

Secara umum, kinerja efektivitas PAD di kota-kota Sumatera Barat masih tergolong baik, namun tren penurunan yang terjadi di sebagian besar kota mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penetapan target PAD agar lebih realistis dan berbasis pada analisis potensi fiskal yang komprehensif.

3. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024. Terdapat beberapa temuan utama dalam analisis pertumbuhan PAD, yaitu:

- a. Kota Bukittinggi mencatat rata-rata pertumbuhan PAD tertinggi sebesar 12,87% per tahun, didorong terutama oleh lonjakan luar biasa sebesar 42,50% pada tahun 2022 yang merupakan cerminan pemulihan sektor pariwisata dan perdagangan pasca pandemi. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 (-5,87%), kota Bukittinggi berhasil kembali tumbuh positif pada tahun 2024 (5,69%), menunjukkan peningkatan fiskal yang relatif baik.
- b. Kota Pariaman mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 9,03%, dengan capaian terbaik pada tahun 2024 (18,14%). Pencapaian ini sangat signifikan mengingat basis PAD Kota Pariaman merupakan yang terkecil secara absolut di antara kota-kota yang diteliti, namun menunjukkan laju pertumbuhan yang dinamis.
- c. Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang masing-masing mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 7,40%, 7,01%, dan 5,22%. Kota Padang memperlihatkan pertumbuhan yang paling stabil meskipun pada tahun 2024 hampir stagnan (0,58%), mengindikasikan adanya potensi saturasi pada beberapa sumber PAD utama yang perlu ditangani melalui kebijakan intensifikasi yang lebih agresif.
- d. Kota Sawahlunto dan Kota Solok mencatat rata-rata pertumbuhan terendah, masing-masing sebesar 3,93% dan 4,46%. Kota Sawahlunto bahkan mencatat kontraksi pada dua dari empat tahun penelitian (-13,54% pada 2021 dan -10,43% pada 2023), mencerminkan fragilitas fiskal yang terkait dengan proses transformasi ekonomi daerah dari berbasis pertambangan menuju pariwisata yang masih berlangsung.

Fenomena yang paling menonjol dari analisis pertumbuhan ini adalah lonjakan pertumbuhan PAD secara serentak pada tahun 2022 di hampir seluruh kota, yang secara jelas mencerminkan momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Fenomena ini menegaskan bahwa pertumbuhan PAD di daerah sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi

makro, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi basis pemungutan pajak dan retribusi daerah (Renyowijoyo, 2012).

4. Kinerja komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024. Beberapa temuan kunci dalam analisis komponen PAD adalah sebagai berikut:
 - a. Kota Padang memiliki struktur PAD yang paling sehat dan matang, dengan Pajak Daerah secara konsisten mendominasi pada proporsi diatas 69% selama seluruh periode penelitian dan meningkat hingga 74,52% pada tahun 2024. Struktur ini mencerminkan kedalaman basis perpajakan yang kuat dan diperkuat oleh tren penurunan proporsi Lain-Lain PAD yang Sah dari 19,75% menjadi hanya 4,17%, yang merupakan indikasi positif dari kualitas dan keberlanjutan penerimaan PAD (Mardiasmo, 2018).
 - b. Kota Pariaman menampilkan diversifikasi komponen PAD yang paling seimbang di antara kota-kota yang diteliti, di mana tidak ada satu komponen pun yang mendominasi secara berlebihan. Kondisi ini merupakan modal penting bagi keberlanjutan fiskal, meskipun masing-masing komponen masih perlu ditingkatkan secara substansial.
 - c. Kota Solok memiliki keunikan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai komponen dominan, mencapai 42,53% pada tahun 2024. Kota ini merupakan satu-satunya dari tujuh kota yang komponen kekayaan daerahnya menjadi kontributor utama PAD, mencerminkan keberhasilan pengelolaan BUMD dan investasi daerah, meskipun di sisi lain juga mengindikasikan keterbatasan kapasitas perpajakan dan retribusi lokal yang perlu diperkuat.
 - d. Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto menunjukkan pola transisi struktural yang sangat dramatis pada tahun 2024, di mana Retribusi Daerah tiba-tiba mendominasi dengan proporsi masing-masing sebesar 67,91%, 66,94%, dan 54,00%,

setelah sebelumnya selama tiga tahun (2021–2023) didominasi oleh Lain-Lain PAD yang Sah.

- e. Kota Bukittinggi memperlihatkan bahwa Retribusi Daerah berhasil melampaui Pajak Daerah untuk pertama kalinya pada tahun 2024, dengan proporsi 39,68% berbanding 38,50%. Hal ini mencerminkan keberhasilan optimalisasi layanan publik berbayar, meskipun perlu dipastikan bahwa peningkatan retribusi tersebut mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan bukan sekadar kenaikan tarif yang berpotensi membebani masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis komponen PAD mengungkapkan bahwa kualitas struktur PAD, tidak hanya besaran nominalnya, merupakan dimensi penting dalam menilai keberlanjutan kapasitas fiskal daerah. Struktur PAD yang bersandar pada instrumen perpajakan yang reguler dan tumbuh seiring perkembangan ekonomi daerah akan jauh lebih berkelanjutan dibandingkan struktur yang bergantung pada penerimaan yang bersifat tidak terstruktur dan sulit diprediksi (Siswanto, 2011).

Berdasarkan keempat dimensi analisis tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa kinerja PAD pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2024 masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, terutama dalam hal kemandirian fiskal dan keberlanjutan sumber penerimaan. Kota Padang unggul secara multidimensi sebagai kota dengan kinerja PAD terbaik, sementara kota-kota kecil seperti Pariaman, Solok, dan Sawahlunto masih membutuhkan reformasi fiskal yang mendalam dan komprehensif untuk dapat mewujudkan otonomi daerah yang bermakna dan berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Periode Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup empat tahun, yaitu tahun 2021-2024. Periode ini dipilih secara strategis karena mencakup fase pemulihan pasca pandemi, namun empat tahun pengamatan belum cukup untuk menunjukkan tren jangka panjang yang lebih representatif dalam kinerja PAD.

2. Keterbatasan Metode Analisis yang Bersifat Deskriptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang hanya mampu menjelaskan fenomena kinerja PAD secara deskriptif tanpa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang secara statistik signifikansi mempengaruhi kinerja PAD

3. Keterbatasan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tujuh Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024.

4. Keterbatasan Cakupan Wilayah pada Level Kota

Penelitian ini hanya mencakup tujuh pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat.

5.3 Saran Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian sejauh ini, maka peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk:

1. Bagi Pemerintah Kota

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah kota yang masih memiliki tingkat kemandirian fiskal rendah, khususnya Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Pariaman, melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terstruktur dan berkelanjutan melalui pemutakhiran basis data objek pajak daerah, modernisasi sistem pemungutan pajak berbasis digital, diversifikasi sumber retribusi daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, seluruh pemerintah kota perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan target PAD agar lebih realistis dan sesuai dengan potensi fiskal daerah sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencapaian PAD. Dalam rangka menjaga pertumbuhan PAD yang stabil dan berkelanjutan, pemerintah daerah juga perlu menyusun strategi pengelolaan PAD jangka menengah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, terutama melalui pengembangan sektor unggulan seperti

pariwisata bagi Kota Bukittinggi, Pariaman, dan Sawahlunto. Selanjutnya, terkait terjadinya lonjakan Retribusi Daerah pada tahun 2024 di beberapa kota, disarankan agar pemerintah daerah maupun peneliti selanjutnya melakukan kajian yang lebih mendalam melalui analisis Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) guna memastikan apakah peningkatan tersebut mencerminkan peningkatan kinerja pemungutan retribusi yang sesungguhnya atau merupakan dampak dari perubahan kebijakan klasifikasi akuntansi penerimaan daerah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD, seperti kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah, tingkat adopsi teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, serta pengaruh kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap komposisi dan pertumbuhan PAD.

